

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar secara cepat ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemic merupakan sebuah istilah dari penyebaran penyakit yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus wabah yang secara tiba-tiba muncul pada suatu populasi area yang terjadi di Wuhan.

Dalam fenomena yang saat ini sedang terjadi yaitu penyebaran virus corona (COVID 19) secara global menuntut pemerintahan Indonesia untuk siap dalam pencegahan, penanganan penyebaran wabah virus (COVID 19). Sehingga resiko angka yang terpapar akibat virus tersebut dapat diminimalisir serendah mungkin agar bisa melakukan aktivitas seperti biasa pada umumnya, tidak ada lagi *social distancing* dan tidak ada lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Karena adanya (PSBB) tersebut masyarakat Indonesia susah untuk melakukan aktivitas seperti pada umumnya, yang bisa menyebabkan keterbatasan ekonomi pada masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah sudah membuat upaya penanganan dengan adanya vaksin agar mengurangi dampak dari virus corona, vaksinasi covid 19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan imun tubuh (*herd immunity*) sebenarnya sistem kekebalan tubuh ini terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami pada saat seseorang terinfeksi virus.

Namun , infeksi yang ditularkan oleh virus corona ini memiliki resiko kematian daya tular yang cepat, oleh karena itu diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yaitu dengan vaksinasi. Supaya masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan kesehariannya, ada beberapa tahapan vaksin Tahap 1-3 berdasarkan ketentuan tanggal yang ditetapkan sesuai jadwal yang telah diberikan.

Pemerintah juga sudah membuatkan aplikasi Peduli Lindungi untuk memberi tanda apakah orang tersebut sudah di vaksin, karena setelah adanya vaksin biasanya di aplikasi tersebut akan muncul keterangan sertifikat vaksin sesuai tahapan yang diberikan. Selain itu di era sekarang ini sedang diberlakukan sistem PPKM Level 1-3 dikarenakan adanya peningkatan kasus (COVID 19) serta munculnya virus baru (*Omicron*) yang sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, namun hal ini tidak dapat dipungkiri, pemerintah harus mengambil tindakan cepat dalam penanganan kasus (COVID 19). Jadi masyarakat harus bisa beradaptasi dengan keadaan pandemi yang sudah merebah di berbagai wilayah Indonesia dan diberbagainegara.

Adaptasi kebiasaan baru merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh semua masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian, pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak di lakukan, akan terjadi resiko penularan yang sangat cepat.

Virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, saat ini dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Karena penyakit yang diduga muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut telah menyebar ke berbagai negara di dunia.

Center for Disease Control and Prevention (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua. Pandemi biasanya memengaruhi sejumlah besar orang di berbagai negara atau benua tersebut.

Pandemi Covid-19 membuat sebagian besar aktivitas jadi dibatasi. Sebagai bentuk pencegahan meluasnya virus corona, beberapa instansi pemerintahan dan perkantoran swasta mengeluarkan kebijakan *work from home* (WFH) untuk karyawannya.

Kebijakan secara umum merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat di sambung pada pemerintahan.

Implementasi merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Implementasi adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang dapat diartikan sebagai hasil kerja atau suatu tindakan dari sebuah perencanaan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan implementasi kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu terjadi tidak seperti seharusnya.

Implementasi dari pegawai atau karyawan dapat dinilai dari sejauh mana dia dapat melakukan tugas-tugasnya. Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas.

Implementasi merupakan pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. **Van Meter & Van Horn (dalam Wahab 2006: 65)**.

Melalui pengukuran implementasi, keberhasilan satuan organisasi atau kerja akan lebih dilihat dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam rencana strategi. Pengukuran implementasi merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di dalamnya informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik suatu barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan, dan sejauh mana pelanggan merasakan kepuasan atas barang dan jasa yang diberikan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan.

Sekarang Indonesia dan negara-negara lain di dunia sedang dalam bencana non alam yaitu pandemi covid -19. Sebelumnya, WHO telah menetapkan Covid-19 atau penyakit yang disebabkan karena virus Corona sebagai pandemi global. Pandemi yang dimaksud penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut *World Health Organization* (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru yang menyebar di seluruh dunia melampaui batas.

Pada masa pandemi masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat berdamai dengan COVID -19. Adapun yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Akibat pandemi yang terjadi tentunya akan mempengaruhi kinerja dari berbagai bidang seperti pendidikan, social budaya, perdagangan serta organisasi termasuk organisasi pemerintahan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Khususnya akan mempengaruhi kinerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana BPBD Provinsi Jawa Barat. Tentunya pandemi yang terjadi saat ini akan sangat berpengaruh terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Di Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan

bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten atau Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Badan penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi untuk melaksanakan kebijaksanaan, penyusunan program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang penanggulangan bencana alam Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu dibutuhkan kinerja yang baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar segala bencana alam dan bencana non alam yang terjadi di Jawa Barat dapat ditanggulangi dengan baik dan cepat.

Badan Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya bertanggung jawab pada saat terjadinya bencana, tetapi bertanggung jawab juga pada pra-bencana, dan pasca bencana. Dalam mencegah terjadinya bencana terdapat sebuah manajemen bencana yang mempelajari langkah untuk mencegah terjadinya bencana, mengurangi dampak buruk atau kerugian yang dihasilkan, tanggap darurat saat terjadi bencana, dan pasca bencana terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Implementasi Kebijakan**

Adaptasi Kebiasaan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Barat.

1.2 Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru Dinas BPBD Provinsi Jawa Barat, yang mana bidang pencegahan bencana di era pandemi lah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan adaptasi kebiasaan baru pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengimplementasi adaptasi kebiasaan baru pada kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan penelitian ini diantaranya.

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Jawa Barat pada Bidang Pencegahan Bencana Di Era Pandemi.
2. Mengetahui Kinerja Bidang Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Barat Di Era Pandemi.

3. Mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat disaat Pandemi.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1 Secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh. Diharapkan pula agar dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama yang berhubungan dengan kompetensi dan untuk meningkatkan implementasi program.
- 2 Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan/rujukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut Implementasi

Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru BPBD Provinsi Jawa Barat.

9

9 3 Kegunaan bagi

pihak umum, hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak umum yang menaruh perhatian dan minat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan

Adaptasi Kebiasaan Baru BPBD

Provinsi Jawa Barat.